

DESEMBER 2021

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN (KIA) DAERAH SE- RIAU TAHUN 2021

Catatan Akhir Tahun-Fitra Riau 2021

PENULIS

Aksiza Utami Putri



PENGANTAR

Keterbukaan Informasi public salah satu aspek penting untuk mendukung tata kelola pemerintah yang baik, UU No. 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa informasi anggaran merupakan informasi publik yang terbuka yang wajib diumumkan secara proaktif melalui saluran informasi yang ada seperti website dan sebagainya. Selajutnya melalui PP No.45 Tahun 2017 menjelaskan bahwa untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah wajib mempublikasikan informasi anggaran mulai pada tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Evaluasi kinerja keterbukaan informasi penting untuk dilakukan pemerintah daerah baik Provinsi Riau maupun Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat masih rendahnya kesadaran pemerintah secara proaktif untuk mengumunkan informasi publik, khususnya informasi berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan anggaran daerah yang cenderung masih tertutup. Padahal informasi tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat sebagaimana telah dijamin dalam dalam UU KIP.

Dalam rangka mengukur kinerja pemerintah daerah terhadap keterbukaan dan akuntabilitas serta memastikan kualitas dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Fitra Riau secara konsisten melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah.

TUJUAN

Adapun tujuan dari melakukan indeks keterbukaan informasi publik pemerintah daerah, adalah;

- Mengukur sejauh mana kinerja keterbukaan informasi pemerintah daerah di Provinsi Riau;
- Menyusun hasil indeks keterbukaan informasi publik terutama perencanaan pembangunan dan anggaran daerah;
- Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

RUANG LINGKUP;

PENILAIAN INDEKS KIA TAHUN 2021



INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN (KIA) 2021

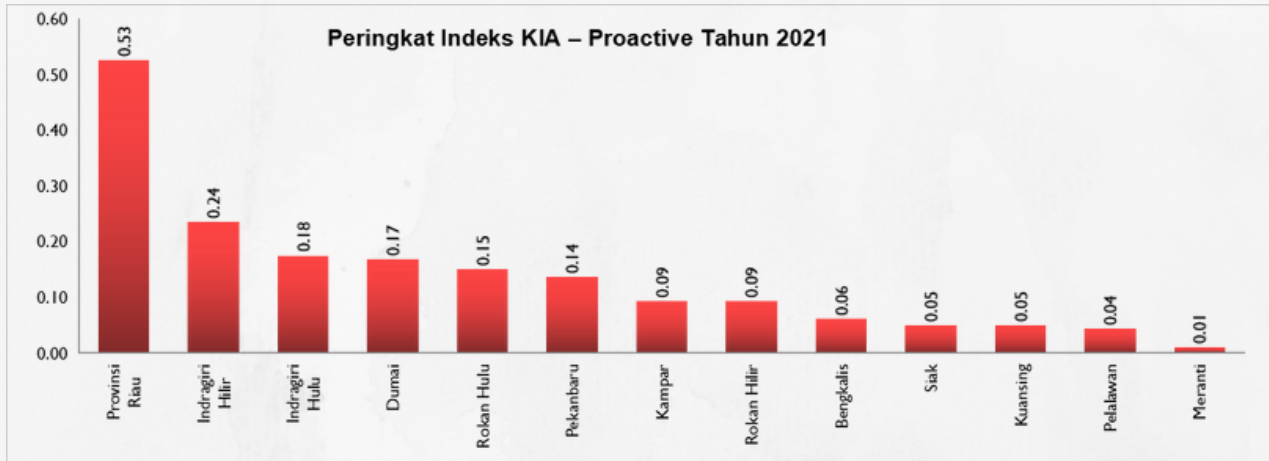
- Studi ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan dua kriteria utama dalam keterbukaan informasi anggaran secara proaktif. Yaitu ketersediaan informasi / dokumen dan aksesibilitas informasi anggaran. Aksesibilitas dengan tiga kategori penilaian, yaitu informasi/dokumen dipublikasikan secara lengkap (full dokumen), publikasi sebagian isi informasi/dokumen, dan ringkasan informasi/dokumen, kemudian diberikan bobot nilai yang berbeda dari masing-masing informasi tersebut.
- Metode peniliran berdasarkan tracking website pemerintah daerah, kemudian disusun menjadi Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA), Informasi yang di nilai yaitu; Informasi Perencanaan Pembangunan, Rancangan APBD, Dokumen APBD dan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020-2021, Penelusuran dilakukan sampai pada tanggal 20 Desember 2021;



KINERJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dimensi	Bobot	Dokumen Informasi	Nilai
Dokumen Perencanaan Pembangunan	0,15	RPJMD	1. Publikasi Full (4)
		RKPD 2021	2. Publikasi Sebagian (2)
		RKPD 2022	3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)
Dokumen Proses Penganggaran	0,30	1. Rancangan Dokumen KUA 2021	1. Publikasi Full (4) 2. Publikasi Sebagian (2) 3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)
		2. Rancangan Dokumen KUA 2022	
		3. Rancangan Dokumen PPAS 2021	
		4. Rancangan Dokumen PPAS 2022	
		5. Dokumen RKA 2021	
		6. Dokumen RKA 2022	
		7. RAPBD 2021	
		8. RAPBD 2022	
Dokumen Anggaran	0,30	Dokumen KUA 2021	1. Publikasi Full (4) 2. Publikasi Sebagian (2) 3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)
		Dokumen KUA 2022	
		Dokumen PPAS 2021	
		Dokumen PPAS 2022	
		Dokumen APBD (Perda) 2021	
		Dokumen APBD (Perda) 2022	
		Dokumen Penjabaran APBD 2021	
Dokumen DPA 2021			
Dokumen Pertanggungjawaban/Audit	0,25	Dokumen LKPD	1. Publikasi Full (4) 2. Publikasi Sebagian (2) 3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)
		Dokumen LHP BPK	

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN (KIA) TAHUN 2021



Peringkat Indeks KIA Tahun 2021, Daerah tertinggi terdapat pada pemerintah Provinsi Riau dengan nilai indeks 0,53, meningkat dari tahun 2020 dengan nilai 0,37. Peringkat Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah Kab. Inhil 0,24, Inhu 0,18 dan Dumai 0,17, Rokan hulu 0,15, pekanbaru 0,14. daerah lainnya berada dibawah angka 0,1 yaitu Kampar, bengkalis, Siak, Kuansing, Pelalawan antara 0,09-0,04 dan dan Kab. Meranti paling rendah hanya 0,01. daerah dengan indek paling rendah menunjukkan bahwa agenda reformasi birokrasi belum didukung kinerja keterbukaan informasi publik.

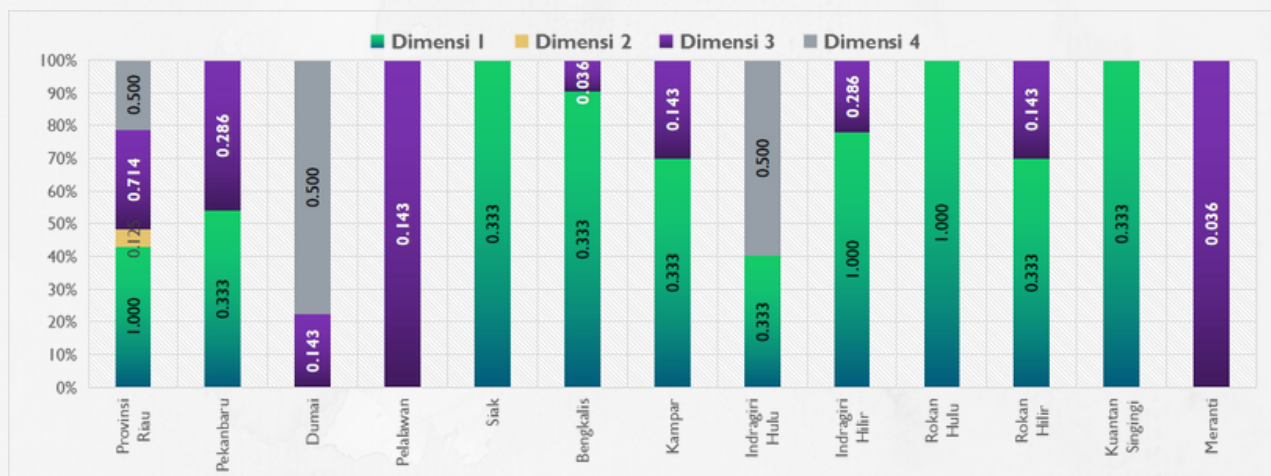
PERBANDINGAN INDEKS KIA TAHUN 2020-2021



Daerah yang mengalami peningkatan kinerja KIA dari tahun 2020-2021 yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar dan Rokan Hilir, Namun peningkatan kinerja belum optimal, karena masih dalam ketegori keterbukaan informasi yang rendah.

Provinsi Riau tahun 2020 mendapatkan nilai 0,37 menjadi 0,53, Indragiri hilir dari 0,10 menjadi 0,24. Sedangkan Kampar dan Rokan Hilir meskipun terjadi peningkatan namun belum cukup baik dengan indeks 0,09. Daerah yang mengalami penurunan indeks yaitu Kab. Inhu, Dumai, Rohul, pekanbaru, Bengkalis, Siak, Kuansing dan Pelalawan. Sedangkan Kab. Meranti pada tahun 2019 tidak ada nilai dan ditahun 2021 mendapat nilai paling rendah 0,01.

INDEKS KIA TAHUN 2021 - BERDASARKAN DIMENSI PENILAIAN



Pengukuran Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) diukur berdasarkan empat dimensi yaitu; Dimensi 1; Dokumen Perencanaan Pembangunan, Dimensi 2; Dokumen Proses Penganggaran, Dimensi 3; Dokumen Anggaran, dan Dimensi 4; Dokumen Pertanggungjawaban.

Dari empat dimensi yang diukur tersebut, Provinsi Riau memiliki informasi yang lengkap dan tersedia dalam website, sedangkan pada kabupaten/kota informasi yang tersedia tidak lengkap dari empat aspek tersebut, sebagian informasi yang tersedia hanya berkaitan dengan informasi perencanaan pembangunan (dimensi 1) dan ringkasan APBD (dimensi 3). Ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota belum mematuhi amanat perundang-undangan untuk membuka informasi anggaran mulai pada tahap perencaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

• KESIMPULAN

Kinerja keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2021, terutama pada daerah kab/Kota masih sangat minim, tidak ditemukan sejumlah informasi anggaran pada website pemerintah menunjukkan daerah kab/kota masih tertutup. Hasil indek menunjukkan sejumlah daerah terjadi penurunan kinerja keterbukaan informasi dari tahun 2020-2021. Pemerintah daerah perlu memperkuat kinerja kinerja keterbukaan informasi publik, apalagi aspek transparansi merupakan bagian dari laporan akuntabilitas pemerintah daerah.

• REKOMENDASI

- 1.Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keterbukaan informasi public menjadi agenda kinerja pembangunan sebagai tujuan dari pencapaian reformasi birokrasi dan pencapaian good governance. Kinerja keterbukaan informasi harus menjadi agenda dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 2.Mendorong Komisi Informasi Riau untuk meningkatkan kinerja edukasi dan memastikan Keputusan KI Riau Nomor 003/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah merupakan informasi publik yang wajib dipublikasikan secara berkala
- 3.Ketersediaan informasi penanganan covid-19 di daerah dapat dikatakan masih sangat minim, ketersediaan informasi anggaran untuk covid tidak dapat ditemukan sama sekali baik melalui website khusus maupun kanal informasi pemda lainnya. Padahal era pandemi kebutuhan informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.



Social Media



@FitraProvinsiRiau



Fitra Provinsi Riau



Fitra Riau

Kontak

sekretariat.fitrariau@gmail.com

- Email

www.fitrariau.org

- Website